

**ANALISIS PERANAN KELUARGA
DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
SECARA ALAMIAH DI KABUPATEN KAMPAR**

Hendro Ekwarso

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika keluarga dalam merencanakan jumlah anak dan pengambilan keputusan penggunaan jenis alat kontrasepsi. Analisis disusun berdasarkan data sekunder dan primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% keluarga transmigran, 55% keluarga migran dan 37% keluarga tempatan di Kabupaten Kampar telah merencanakan jumlah anak yang diinginkan. Rata-rata jumlah anak yang diinginkan yaitu antara 2- 3 anak. Strategi yang ditempuh dalam merencanakan dan mengendalikan jumlah keluarga adalah melalui penggunaan alat kontrasepsi. Jenis alat kontrasepsi yang banyak dipilih keluarga adalah suntikan. Peranan istri dalam menentukan jenis alat kontrasepsi yang digunakan juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari keputusan terhadap penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan lebih banyak diputuskan secara bersama antara suami dan istri.

Keywords : Keluarga Berencana

1. PENDAHULUAN

Keluarga memiliki peranan penting dalam mendukung program pemerintah terutama dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Karena salah satu ujung tombak suksesnya program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah, sangat ditentukan oleh keluarga terutama suami istri dalam mengambil keputusan untuk merencanakan jumlah anak yang diinginkan dan berapa lama jarak usia antar anak yang akan dilahirkan serta pertimbangan-pertimbangan lainnya yang terkait dengan keinginan untuk memiliki anak.

Apabila paradigma yang tertanam pada sebagian besar keluarga yaitu "banyak anak banyak rejeki" maka hal tersebut akan mendorong pertumbuhan penduduk suatu wilayah yang lebih cepat. Oleh karena itu, cara pandang dan bagaimana keluarga merencanakan jumlah anak yang diinginkan akan menjadi penting dalam mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera dan pengendalian jumlah penduduk suatu wilayah. Disisi lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kualitas manusia hanya akan menjadi beban dalam proses pembangunan. Maka, menjadi penting untuk mengendalikan jumlah penduduk baik secara alamiah maupun non alamiah. Pengendalian secara alamiah dapat dilakukan melalui perencanaan jumlah kelahiran yang dilakukan oleh keluarga. Penduduk merupakan salah satu komponen dan modal dasar pembangunan. Banyak yang percaya bahwa semakin besar jumlah penduduk, semakin penting dalam mendorong permintaan, dan kemudian akan meningkatkan aktifitas ekonomi. Kondisi demikian jelas sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kualitas dari jumlah penduduk yang dimiliki. Jika kualitas penduduk semakin meningkat maka justru penduduk dapat dijadikan sebagai modal, sebaliknya jika kualitas penduduk rendah, justru penduduk yang banyak dapat dianggap menjadi beban masyarakat.

Dewasa ini program kependudukan masih perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang, lebih khusus lagi menempatkan program keluarga berencana untuk menghasilkan dimensi kependudukan, yang sesuai dengan agama dan adat, dimana keluarga yang dihasilkan bukan saja sekedar pembentukan suami-istri dan anak-anak, namun lebih dari itu keluarga yang dibentuk adalah sesuai dengan yang diisyaratkan melalui Alquran dan Hadist, serta dalam kitab lainnya yang dipercayai.

Jika tidak dilakukan penelaahan dan penyusunan konsep keluarga, dalam jangka panjang akan kehilangan momentum, termasuk hilangnya nilai-nilai keluarga yang universal, termasuk hilangnya kebudayaan keluarga, dimana Kampar sangat relevan dijadikan salah satu Kabupaten yang memiliki niat untuk merumuskan keluarga dalam jangka panjang.

Oleh karenanya, diperlukan penelaahan bagaimana sebenarnya eksistensi keluarga yang ada saat ini, kemudian bagaimana aspek keputusan demografis, dan sosial dalam rumah tangga sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dan mengemuka apa persoalan utama yang sedang dialami dalam dinamika keluarga di Kabupaten Kampar. Lebih-lebih lagi bagaimana dalam jangka panjang perkembangan dan globalisasi dapat melahirkan dan meningkatkan eksistensi keluarga, dan dengan demikian diharapkan keluarga yang dihasilkan merupakan modal pembangunan.

2. KERANGKA TEORITIS

Penduduk dapat dianggap sebagai modal, dan sebaliknya dapat dianggap sebagai beban. Penduduk dianggap sebagai modal bilamana terjadi permintaan yang potensial untuk barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan, kemudian akan menyebabkan terjadinya penambahan tabungan. Tabungan yang meningkat dapat dijadikan sebagai cadangan untuk menambah investasi di daerah.

Penduduk sebagai modal terjadi ketika dalam jumlah yang ada penduduk memiliki kualitas dan inovasi. Sehingga dalam perjalanannya, akan dapat meningkatkan produktivitas kerja, dan memiliki daya saing. Penduduk yang memiliki daya saing tinggi akan menghasilkan barang-barang dengan skala mudah dan selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya efisiensi. Negara RRC dan India termasuk dua negara yang memiliki daya saing yang semakin tinggi, yang memiliki penduduk yang banyak.

Konsep Keluarga Sakinah dan Mawaddah, merupakan cita-cita kita. Keluarga Sakinah dihuni baik oleh keluarga inti maupun keluarga batih, namun dalam perjalanan keluarga menjunjung tinggi norma-norma dan ketentuan agama yang berlaku. Dalam Agama Islam, Keluarga Sakinah ditandai dengan kerukunan, kemudian melaksanakan ibadah sesuai dengan syariah, dan melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, sesuai dengan yang dianjurkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Sehingga konsep Keluarga Sakinah jauh lebih luas dibandingkan dengan keluarga inti yang dirumuskan oleh kebanyakan ahli sosiologi.

Penciri dari Keluarga Sakinah adalah setidaknya besaran keluarga direncanakan sesuai dengan kesanggupan dari kedua belah pihak, suami-istri, dan menjadikan anak-anak tidak saja sebagai generasi emas pada masa yang akan datang, namun lebih dari itu anak merupakan investasi yang akan dapat berguna baik untuk kepentingan individu, sosial, maupun dengan sang pencipta.

Selain dari itu Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang terbentuk atas dasar tuntunan Allah, dimana peranan orang tua saling mengisi, dan menempatkan ibu sebagai pendidik utama, dan bapak sebagai pencari nafkah, didasari oleh nilai-nilai universal, kerukunan dan ketatakramaan baik di dalam keluarga, maupun antar keluarga.

Untuk menjadikan Keluarga Sakinah syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa keluarga merencanakan besaran jumlah anak yang akan dimiliki, keputusan adalah bersama secara harmonis. Dengan demikian perencanaan keluarga ditopang oleh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menentukan besaran keluarga.

Pelayanan pemerintah adalah berupa koreksi yang dilakukan agar Keluarga Sakinah dapat diwujudkan. Dalam arti pelayanan keluarga tidak saja mengarah kepada bagaimana pelayanan kontraseptif, namun lebih dari itu pelayanan yang dapat mengatasi persoalan keluarga untuk menuju Keluarga Sakinah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengembangan Keluarga Sakinah pada masa yang akan datang mesti mampu mengakomodasi tantangan internal dan eksternal. Pemerintah daerah yang menyediakan pelayanan keluarga mesti pula tidak hanya melihat pelayanan yang diberikan oleh institusi keluarga, namun juga institusi yang dibentuk agar dapat meningkatkan fungsinya. Misalnya institusi pendidikan, institusi keterampilan, serta infrastruktur lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang misalnya data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Mengingat Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang cukup luas, maka data-data kependudukan yang luas dimensinya masih relatif terbatas. Untuk itu tahap pertama dilakukan kompilasi data-data kependudukan dari berbagai sumber.

Sedangkan data primer dikumpulkan dengan melibatkan beberapa kecamatan dalam sistem sampling. Sistem sampling dimulai dengan mengelompokkan atas dasar kecamatan yang ada, khususnya mengakomodasi kecamatan tempatan, transmigran dan daerah tujuan migrasi. Kemudian dipilih 12 desa yang mengikuti azas bagaimana dinamika kependudukan dari sisi sifat dan cirinya. Teknik yang digunakan adalah menggunakan *geographical quota sampling* (GQS) dengan kuota sampling masing-masing 25 rumah tangga per desa. Pemilihan ini didasari oleh hasil dokumen yang ingin disusun. Dimana perlu memperlihatkan unsur geografis dan karakter masyarakat.

Karakteristik masyarakat di Kabupaten Kampar dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok besar sebagai berikut :

- a. Masyarakat tempatan.
- b. Masyarakat migran dan perkotaan.
- c. Masyarakat transmigrasi.

Sampel penelitian dengan mengacu kepada sistem kuota diperlukan sebanyak 300 rumah tangga. Pemilihan rumah tangga didasarkan dari hasil pelacakan awal melalui tahapan dari masing-masing desa terpilih. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan pilihan jumlah sampel yang disusun secara sistematis dengan interval 3 rumah tangga dari rumah tangga pertama yang dipilih secara acak.

Kemudian pemilihan rumah tangga berikutnya disesuaikan secara konsisten dengan pengambilan sebelumnya. Jumlah ini sudah cukup merepresentasikan untuk penyusunan dokumen. Mengingat yang ingin digali dari sampel adalah bagaimana aspek demografis, apakah yang mereka rasakan persoalan utama dalam keluarga berencana, disertai dengan pelayanannya, serta bagaimanakah strategi untuk mengatasi persoalan kependudukan juga didasarkan atas hasil analisis yang diberikan oleh responden.

Tabel 1 : Realisasi Distribusi Sampel Penelitian Revitalisasi KB Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Desa		Sampel
1.	Wilayah Pedesaan Kec. Kampar Kiri Hulu	Desa Tempatan	Tanjung Belit	25
		Desa Migran	Gema	25
		Desa Transmigran	Tj. Belit Selatan	25
	Kec. Tapung	Desa Tempatan	Pantai Cermin	25
		Desa Migran	Petapahan	25
		Desa Transmigran	Petapahan Jaya	25
2.	Wilayah Perkotaan Kec. Bangkinang Seberang	Desa Tempatan	Pasir Sialang	25
		Desa Migran	Palau Lawas	25
		Desa Transmigran	Suka Mulya	25
	Kec. Kampar Kiri Hilir	Desa Tempatan	Petai Kecil	25
		Desa Migran	Sungai Pagar	25
		Desa Transmigran	Simpang Dua	25
Jumlah				300

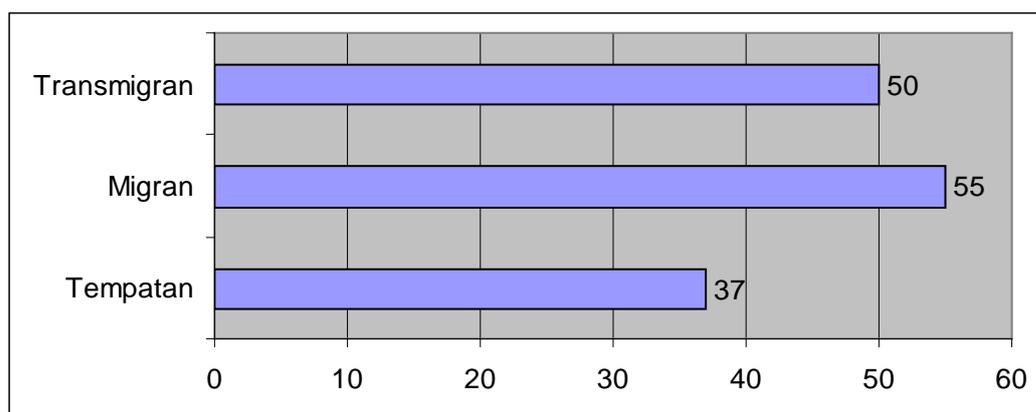
Selanjutnya data sekunder dan data primer dianalisis melalui pendekatan deskriptif yang menjelaskan aspek keluarga dalam merencanakan jumlah anak yang diinginkan, keputusan menggunakan alat KB, dan cara yang efektif untuk menyebarluaskan informasi tentang KB, serta pencapaian program KB di Kabupaten Kampar.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Salah satu aspek yang dapat dijadikan tolok ukur perencanaan tingkat pertumbuhan penduduk dalam rangka untuk mengendalikan jumlah penduduk secara alamiah pada suatu wilayah adalah sampai seberapa banyak keluarga ingin merencanakan jumlah anggota rumah tangga atau jumlah anak. Merencanakan rumah tangga menjadikan pengendalian kelahiran akan lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak direncanakan jumlah anaknya.

Untuk memperoleh gambaran demikian, maka dari sampel yang ada dilakukan pertanyaan tentang rencana jumlah anak yang diinginkan, disertai dengan rencana jumlah anak. Hasil kajian menunjukkan tidak terlalu besar berbeda antara keluarga transmigran dengan migran, dalam hal merencanakan besarnya jumlah anak yang diinginkan, dimana rumah tangga migran yang merencanakan jumlah anak yaitu sebesar 55 persen dan rumah tangga transmigran sebesar 50 persen. Sedangkan rumah tangga tempatan pada umumnya (63 persen) belum merencanakan banyaknya jumlah anak yang diinginkan.

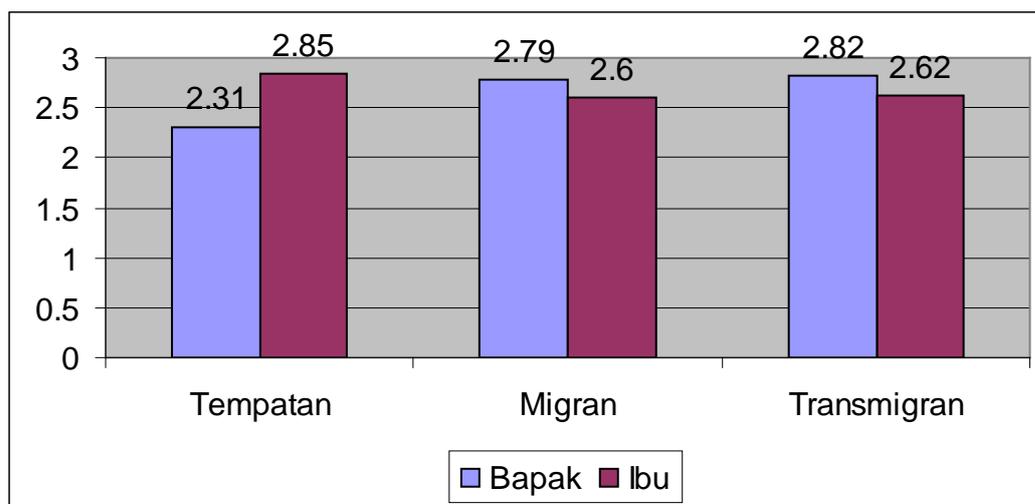
Gambar 1 : Persentase Rumah Tangga Yang Menginginkan Jumlah Anak



Ini memberikan implikasi penting bahwa pada rumah tangga tempatan konsep besarnya jumlah anggota rumah tangga tidak diketahui secara persis. Sementara pada daerah yang relatif sudah maju ada tendensi semakin merencanakan jumlah anak. Yang memberikan kemudahan dalam menaksir masa depan besaran keluarga.

Persoalannya adalah ketika terjadi keinginan dalam merencanakan jumlah anak, pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar rata-rata keinginan merencanakan jumlah anak?. Jika antara merencanakan jumlah anak dengan jumlah anak yang lahir menunjukkan tendensi selisih besar, maka dapat diperkirakan bahwa angka kelahiran justru akan naik. Sebaliknya jika terjadi kesamaan, relatif jumlah angka kelahiran tetap saja akan sama. Demikian juga halnya persoalan yang terkait dengan perbedaan anak yang diinginkan antara ibu dengan bapak. Jika terjadi perbedaan, lantas perbedaan itu arahnya kemana. Jika terjadi kesamaan dalam penentuan besaran jumlah anak yang diinginkan, maka hal ini cenderung berakibat pada keputusan sebesar dari yang diinginkan. Namun selanjutnya jika terjadi perbedaan keputusan jumlah anak yang diinginkan, maka jelas akan berimplikasi pada peningkatan rata-rata kepemilikan jumlah anak.

Gambar 2 : Rata-Rata Jumlah Anak Yang diinginkan



Dari gambaran data yang ada, responden pria menjawab dan merencanakan jumlah anak justru terjadi hal yang menarik. Dimana rencana jumlah anak keluarga tempatan relatif rendah dibandingkan dengan keluarga migran atau keluarga transmigran. Rumah tangga keluarga transmigran merencanakan besarnya jumlah anak sekitar 2,82 persen rata-rata, disusul keluarga migran sebesar 2,79 persen. Sementara keluarga tempatan merencanakan jumlah anak sebesar 2,31 persen oleh bapak. Namun ibu merencanakan lebih tinggi. Bisa saja ini dengan alasan kepemilikan aset yang masih ada, serta faktor psikologis sebagai konsekuensi dari pengalaman masa lalu, misalnya menyisip jumlah anak sebagai akibat dari adanya sejarah kematian sebelumnya. Artinya, kemungkinan besar keluarga tempatan sudah mulai merencanakan jumlah dan besaran keluarga, namun sayangnya proporsi mereka yang merencanakan jumlah anak relatif terbatas. Dapat diperkirakan jumlah anak tetap akan tinggi pada keluarga tempatan dibandingkan dengan keluarga lainnya, mengingat keinginan yang cukup berbeda pada keluarga tempatan dari yang disampel.

Pilihan akan jumlah anak yang relatif tinggi pada kaum migran oleh kaum bapak, dan transmigran bisa saja menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan kedua kelompok keluarga ini, kemudian menjadikan pilihan jumlah anak semakin banyak dibandingkan dengan pada sebagian keluarga tempatan. Ini memberikan makna bahwa dalam jangka panjang dapat dipahami bahwa pengendalian kelahiran tetap saja diperlukan pada kelompok yang tidak merencanakan besaran keluarga. Pilihan akan jumlah anak oleh ibu sudah lebih rendah dibandingkan dengan lelaki, yang berimplikasi bahwa dalam jangka panjang bisa saja kelahiran pada keluarga migran dapat dikendalikan dibandingkan dengan keluarga tempatan. Beberapa dimensi keluarga berencana dianalisa sesuai dengan arah kebijakan yang akan dilakukan. Diantaranya adalah memahami bagaimana keputusan menggunakan alat kontrasepsi, sementara juga dipelajari bagaimana mereka mengikuti keluarga berencana dalam konteks akses terhadap pelayanan dan alat kontrasepsi, disertai dengan alasan keikutsertaan keluarga berencana. Dengan demikian dipahami lebih jauh bagaimana kondisi tentang keluarga berencana di daerah ini, sebagai dasar pengembangan program.

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa saat wawancara, hanya sebanyak 17,3 persen diantara responden yang bukan akseptor KB, mungkin disebabkan masih muda, atau sudah tidak lagi memiliki potensi melahirkan. Angka ini relatif rendah mengingat responden yang ikut KB sudah 82,7 persen. Selanjutnya dari 300 responden sebesar 237 responden adalah akseptor KB wanita, dan hanya 11 orang yang ikut akseptor KB pria, dimana 3,6 persen akseptor KB pria. Sementara sisanya adalah (96,3%) adalah akseptor wanita.

Persoalan kemudian adalah jika akseptor KB adalah wanita dilakukan atas dasar kompromi, hal itu masih lebih relatif terkendali, ketimbang keputusan akseptor dilakukan oleh wanita saja, atau pria saja. Dari data yang ada menunjukkan bahwa 37,3 persen responden akseptor memutuskan penggunaan akseptor atas dasar keputusan bersama suami-istri. Sementara sebesar 40 persen dari responden merupakan keputusan lebih pada ibu yang menentukan tanpa adanya kompromi. Sisanya keputusan diberikan oleh sanak famili, tetangga, dan keluarga lainnya. Sedangkan 12 persen dari responden yang tidak memperoleh informasi tentang keluarga berencana, dan informasi ini tidak diperoleh bisa saja dimaksudkan belum dimengerti secara utuh.

Tabel 2 : Jumlah Responden Sesuai Dengan Alat KB Yang Digunakan

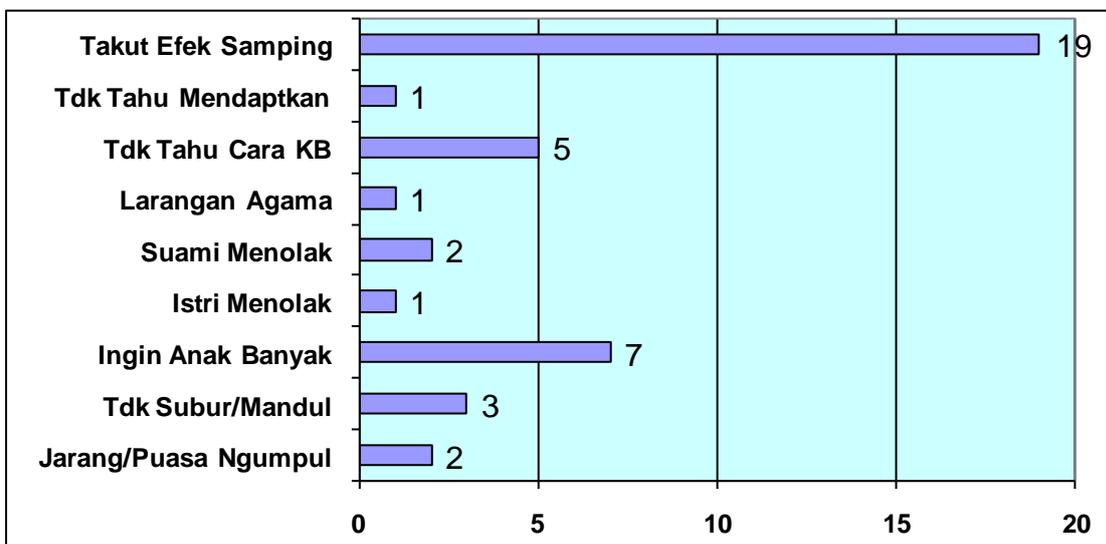
Jenis Alat	Alat Pertama	Saat Sekarang
Steril Ibu	6	7
Steril bapak	6	2
Pil	69	56
IUD	7	8
Suntikan	159	140
Kondom	4	3
Berkala	1	4
Implan	1	6

Sumber : Data Primer Olahan

Walaupun demikian masih juga terjadi perubahan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Dari sebanyak 190 reponden yang merubah dan memilih alat kontrasepsi tertentu, mereka menukar alat kontrasepsi disebabkan karena tidak cocok. Sementara itu sebanyak 65 responden dari 190 pemilih kontrasepsi (atau setara dengan 34%). Penggunaan alat kontrasepsi tertentu diputuskan sebagai akibat keputusan bersama istri atau suami sebanyak 20 orang merubah alat kontrasepsi, anjuran petugas sebanyak 15 kasus, dan ingin merubah cara lain sebanyak 10 kasus. Ini memberikan implikasi bahwa ketidakcocokan menggunakan alat kontrasepsi perlu menjadi salah satu unsur penting dalam pelayanan keluarga berencana di daerah ini.

Dari 300 responden, maka ditemukan sebanyak 41 kasus dimana responden tidak menggunakan alat kontrasepsi, sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh masing-masingnya. Diantara kasus yang paling menonjol adalah takut efek samping, dimana dari 41 kasus tersebut yang menjawab ada efek samping sebanyak 19 kasus, atau sekitar 50 persen dari kasus penolakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi. Sementara persoalan tidak tahu akan perolehan alat KB masih ditemukan sebanyak 5 responden. Dan yang benar-benar tidak menggunakan KB sebagai alasan ingin memperoleh anak sebanyak-banyaknya juga masih dominan, sebanyak 7 kasus rumah tangga.

Gambar 4 : Kasus Penggunaan Alat Kontrasepsi



Dengan demikian dapat dimengerti bahwa alasan dari tidak menggunakan kontrasepsi juga perlu dijadikan sebagai bahan dalam menyusun program. Dimana adanya kompleksitas persoalan yang dihadapi. Diantaranya kurang kampanye saja tidak dapat dijadikan sebagai halangan dalam memperbaiki program keluarga berencana. Selain dari itu norma untuk memiliki anak banyak memang masih ditemukan pada sebagian kecil rumah tangga.

Pendidikan masih menjadi masalah serius yang dihadapi Kabupaten Kampar. Masih banyak ibu rumah tangga yang tamat Sekolah Dasar yang tidak melanjutkan pendidikan formal yang dikarenakan keterbatasan dana atau kemiskinan dan masalah geografis. Kemudian ijazah tertinggi yang dimiliki atau pendidikan yang ditamatkan oleh seorang penduduk menunjukkan suatu prestasi dan tingkatan pendidikan yang telah mereka selesaikan. Secara teori mengatakan bahwa, semakin tinggi ijazah yang dimiliki seseorang maka semakin berkualitaslah orang tersebut, karena mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang lebih baik atau banyak dibandingkan mereka yang ada di bawahnya.

Adapun tingkat pendidikan responden berdasarkan ijazah yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 : Tingkat Pendidikan Ibu Rumah Tangga dan Jumlah Anak

Tingkat Pendidikan/Ijazah	Responden	Persentase	Rata-Rata Jumlah Anak
Tidak Tamat SD	24	8,00	4,45
SD	125	41,67	2,79
SLTP	83	27,67	2,32
SLTA	61	20,33	1,98
Sarjana muda	5	1,66	2,20
Sarjana	2	0,67	2,50
Total	300	100,00	2,65

Sumber : Data Primer Olahan

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar dari responden ibu rumah tangga adalah tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 41,67 persen diikuti oleh tamat SLTP sebesar 27,67 persen dan tamat SLTA sebesar 20,33 persen kemudian tidak sekolah sisanya adalah Sarjana Muda dan Sarjana 0,67 persen. Rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh responden ibu rumah tangga menurut tingkat pendidikan adalah; Responden yang tidak tamat Sekolah Dasar rata-rata jumlah anaknya adalah 4 orang, tamat Sekolah Dasar 3 orang, tamat sekolah lanjutan pertama (SLTP) lebih dari 2 orang dan rata-rata jumlah anak untuk pendidikan SLTA adalah 2 orang serta Sarjana Muda dan Sarjana 2 orang. Dari data responden di atas juga dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi jumlah anak dimana jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh responden yang pendidikannya rendah lebih banyak dari responden ibu rumah tangga yang berpendidikan lebih tinggi. Untuk mengatasi kondisi ini perlu program keluarga berencana yang akhir-akhir ini mulai dilupakan untuk digalakan kembali dengan program yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

5. PENUTUP

Pertimbangan dalam hal merencanakan jumlah anak antara rumah tangga tempatan dengan migran menunjukkan bahwa rencana jumlah anak keluarga tempatan relatif rendah dibandingkan dengan keluarga migran atau keluarga transmigran. Rumah tangga keluarga transmigran merencanakan besarnya jumlah anak sekitar 2,82 persen rata-rata, disusul keluarga migran sebesar 2,79 persen. Sementara keluarga tempatan merencanakan jumlah anak sebesar 2,31 persen oleh bapak.

Sebesar 17,3 persen responden bukan merupakan akseptor KB, disebabkan usia masih muda, atau sudah tidak lagi memiliki potensi melahirkan. Angka ini relatif rendah mengingat responden yang ikut KB sudah 82,7 persen. Dari 300 responden sebesar 3,6 persen merupakan akseptor KB pria, dan sisanya 96,3 persen adalah akseptor wanita. Dari data menunjukkan 37,3 persen responden akseptor memutuskan penggunaan akseptor atas dasar keputusan bersama suami-istri, 40 persen merupakan keputusan dari

ibu yang lebih menentukan tanpa adanya kompromi. Sisanya keputusan diberikan oleh sanak famili, tetangga, dan keluarga lainnya. Sebesar 12 persen responden tidak memperoleh informasi tentang keluarga berencana, dan informasi ini tidak diperoleh bisa saja dimaksudkan belum dimengerti secara utuh.

Sebagian besar dari responden ibu rumah tangga adalah tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 41,67 persen diikuti oleh tamat SLTP sebesar 27,67 persen dan tamat SLTA sebesar 20,33 persen kemudian tidak sekolah sisanya adalah Sarjana Muda dan Sarjana 0,67 persen. Rata-rata jumlah anak yang dimiliki responden yang tidak tamat SD 4 orang, tamat Sekolah Dasar 3 orang, tamat SLTP lebih dari 2 orang, dan rata-rata jumlah anak untuk pendidikan SLTA adalah 2 orang, serta Sarjana Muda dan Sarjana 2 orang.

Berdasarkan pertimbangan persoalan dinamika demografis, rencana peningkatan pelayanan keluarga, serta struktur dan model pendekatan revitalisasi KB, maka rekomendasi yang diberikan adalah :

Diharapkan tersedianya Peraturan Daerah tentang kelembagaan pra nikah yang dapat dijadikan rujukan penataan pembentukan Keluarga Sakinah, menjelang tahun 2012, sehingga pada tahun 2013 proses sosialisasi dari konsep Keluarga Sakinah sudah dapat dilaksanakan. Khususnya ditujukan kepada kelompok generasi muda. Dengan mengacu pada proses sosialisasi, maka diharapkan akan meningkatkan akseptor baru menjadi 75%.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- BPS. *Kampar Dalam Angka 2005*.
- BPS. *Kampar Dalam Angka 2006*.
- BPS. *Riau Dalam Angka 2007*.
- BPS. *Pendapatan Regional Kabupaten Kampar, 2006*.
- BPS. *Survey Sosial Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2006*.
- BPS, Departemen Sosial. 2004. *Profil Penduduk Fakir Miskin 2003*. Jakarta : BPS – Departemen Sosial.
- Bappenas. 2004. *Indonesia : Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals)*. Jakarta.
- Bappenas, 2004. *PPA Partisipatory Poverty Assesment*. Jakarta : Bappenas – KIKIS.
- Bernadine R. Wirjana. 2007. *Pelayanan Sosial Berkwalitas Menganggapi Situasi Krisis*. Dewan Nasional Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. *Profil Kesehatan Kabupaten Kampar 2006*.
- Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. 2005. *Kumpulan Rancangan Peraturan Penataan Persebaran Penduduk*. Jakarta.
- Elfindri. 2001. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Andalas University Press.
- Herman Haeruman Js. 1991. *Pertumbuhan Penduduk, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup*. Perencanaan Pembangunan. KORPRI Unit BAPPENAS. Jakarta.
- Koensatwanto Inspasihardjo. 1996. *Pendidikan dan Keterampilan Sumberdaya Manusia*. Perencanaan Pembangunan. KORPRI Unit BAPPENAS. Jakarta.
- Kartono Mohamad. 1988. *Peranan Keluarga Dalam Kesehatan*. Prisma, LP3ES, Jakarta.
- Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Kampar, 2007.
- Masri Singarimbun. 1994. *Masalah Penurunan Angka Kelahiran*. Prisma, LP3ES, Jakarta.
- Masri Singarimbun. 1988. *Pencapaian Keluarga Berencana di Indonesia*. Prisma, LP3ES, Jakarta.

Prijono Tjiptoherijanto. Kebijakan *Pengarahan Dalam Mobilitas Penduduk*. Perencanaan Pembangunan. KORPRI Unit BAPPENAS. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Yaumil C.A. Achir. 1994. *Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Bangsa*. Prisma, LP3ES, Jakarta.